



**NOTA KESEPAKATAN**

**ANTARA**

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**DENGAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**NOMOR : 1/KSP/I/2007**  
**NOMOR : 1/K/DPRD/2007**  
**TANGGAL : 15 Januari 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2007,**

**NOMOR : 2/KSP/X/2006**  
**NOMOR : 16/K/DPRD/2006**  
**TANGGAL : 7 Oktober 2006**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2007,**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. N a m a : Hamengku Buwono X  
J a b a t a n : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Alamat Kantor : Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. a. N a m a : H. Djuwarto  
J a b a t a n : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta  
b. N a m a : Drs. Gandung Pardiman, MM  
J a b a t a n : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

- c. N a m a : Istianah ZA, SH, M.Hum  
J a b a t a n : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta
- d. N a m a : H. Agus Sulistiyono  
J a b a t a n : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan APBD diperlukan kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2007.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sepakat terhadap target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah dan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang direncanakan akan dicapai dalam tahun anggaran 2007 sebagai berikut:

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD yang merupakan rencana kerja tahunan daerah disusun berdasarkan amanat dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-undang tersebut mewajibkan setiap Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020, tertanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJPD dan RPJMD, salah satu pernyataan menyebutkan bahwa bagi daerah-daerah yang belum melaksanakan Pilkada

langsung, Renstra Daerah atau Propeda berlaku sebagai dokumen perencanaan jangka menengah hingga berakhir masa bakti Kepala Daerah, sehingga penyusunan RKPD dan KUA mengacu kepada Renstrada Propinsi DIY Tahun 2004-2008.

Pemerintah Propinsi DIY telah menyiapkan RKPD Tahun 2007 melalui proses Musrenbang Propinsi yang merupakan forum para pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan daerah dan merupakan kelanjutan dari musyawarah-musyawarah di tingkat Kabupaten/Kota. Konsep RKPD Tahun 2007 tersebut disusun sebelum terjadi bencana alam gempa bumi pada tanggal 27 Mei 2006, sehingga beberapa substansi menjadi kurang relevan dengan kondisi pasca bencana.

Mengingat hal tersebut di atas, KUA Tahun 2007 disusun menyesuaikan dengan kondisi pasca bencana gempa bumi untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Kebijakan Umum APBD memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasari. Asumsi yang dimaksud adalah mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah.

Kebijakan Umum APBD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### Bab I Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, gambaran umum kondisi Provinsi DIY sebelum dan sesudah bencana serta identifikasi masalah dan tantangan.

#### Bab II Gambaran Umum RKPD

Menguraikan prioritas pembangunan daerah untuk menyelesaikan masalah dan tantangan.

#### Bab III Kerangka Ekonomi Makro dan Implikasinya terhadap Sumber Pendanaan

Menguraikan asumsi dan kondisi ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD dan perkiraan penerimaan untuk mendanai seluruh pengeluaran.

#### Bab IV Penutup

## **B. Kondisi Umum Daerah**

Kondisi umum Provinsi DIY secara menyeluruh dapat digambarkan sebagai berikut:

### **1. Sosial Budaya**

Pembangunan bidang sosial budaya terkait erat dengan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Kondisi kehidupan masyarakat dapat tercermin pada aspek kependudukan dan aspek kualitas seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.

Di bidang kependudukan, jumlah penduduk Provinsi DIY secara absolut terus bertambah. Namun apabila dilihat dari laju pertumbuhannya selama dua puluh tahun terakhir kecenderungannya menurun. Laju pertumbuhan penduduk menunjukkan angka di bawah 1%. Dibandingkan dengan provinsi lain, laju pertumbuhan tersebut merupakan terkecil di Indonesia. Rendahnya pertumbuhan penduduk tersebut, menyebabkan tingkat kepadatan penduduk tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2005 kepadatan penduduk sebesar 1.018,04 jiwa/km<sup>2</sup>. Namun demikian penyebaran pendudukan dan komposisi demografi yang tidak merata tetap menjadi masalah utama dalam kependudukan.

Dalam aspek sumberdaya manusia, berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang merupakan indeks komposit dari komponen indeks angka harapan hidup, indeks angka melek huruf, indeks rerata lama sekolah dan indeks pengeluaran riil perkapita, pada tahun 2002 dan 2004, IPM DIY menempati urutan ketiga setelah Sulawesi Utara dan DKI Jakarta, dengan indeks capaian 69,8 dan 72,9.

Dalam bidang kesehatan, pembangunan yang dilakukan dalam rangka mendukung program Indonesia Sehat 2010 dan mewujudkan Yogyakarta Sehat 2005 dikatakan telah berhasil, yang ditunjukkan dengan tercapainya indikator-indikator kesehatan sebagai berikut: IMR 23,53 perseribu kelahiran hidup, angka kematian ibu melahirkan 110 perseratus ribu kelahiran hidup dan umur harapan hidup rata-rata 70,25 tahun. Indikator tersebut menunjukkan kondisi yang lebih baik bila dibandingkan dengan tingkat nasional. Permasalahan kesehatan yang pada saat ini memerlukan prioritas penanganan adalah DBD, TBC, penyakit degeneratif, malaria, kekurangan gizi, angka kematian ibu dan angka kelahiran bayi.

Dalam bidang pendidikan, kondisi tingkat pendidikan penduduk sebagai dampak kebijakan pemerataan pendidikan, terutama kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun sudah menunjukkan angka yang tinggi dan sudah berhasil dituntaskan pada tahun 1996 baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Indikator pembangunan bidang pendidikan meliputi Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan SMP/MTs telah mencapai lebih dari 100%. Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 7 – 12 tahun, 13 – 15 tahun dan 16–18, semuanya telah melampaui ketentuan Standar Pelayanan Minimal. Dalam kejuaraan bidang pendidikan pada tahun 2004 telah meraih Medali Perak dan Perunggu Olimpiade IPA SD, Medali Perunggu Olimpiade MIPA SMA, tahun 2005 Juara II Olimpiade Kimia SMA, Juara IV Debat Bahasa Inggris SMA dan, Juara I International *Junior Science Olympiad*. Peningkatan kualitas dan perluasan akses pendidikan masih merupakan masalah utama dalam pembangunan pendidikan. Berdasarkan persentase penduduk menurut ijazah dan STTB tertinggi yang dimiliki, DIY menduduki peringkat kedua di bawah DKI Jakarta, dengan nilai 33,98% (2004).

Di bidang ketenagakerjaan, jumlah penduduk usia kerja Provinsi DIY pada tahun 2005 (Susenas 2005) sebanyak 2.573.019 orang (5,05%) yang terdiri dari angkatan kerja sebanyak 1.851.209 orang, bekerja 1.757.702 orang, penganggur terbuka sebanyak 93.507 orang dan setengah penganggur sebanyak 466.396 orang. Tingkat pengangguran dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan sebagai akibat kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan. Peningkatan jumlah Angkatan Kerja rata-rata per tahun mencapai 2,65%. Penduduk yang bekerja menurut lapangan didominasi oleh sektor pertanian (pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertanian lainnya), kemudian disusul oleh sektor jasa, sektor perdagangan, sektor industri pengolahan, sektor angkutan, dan sektor lainnya (pertambangan, listrik, gas dan air, bangunan, kerajinan). Kualitas angkatan kerja apabila diukur dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan masih relatif rendah, karena masih didominasi oleh penduduk yang tidak berpendidikan ataupun berpendidikan sekolah dasar.

Dalam aspek kesejahteraan masyarakat, taraf kesejahteraan sosial masyarakat cukup memadai sejalan dengan berbagai upaya pemberdayaan, pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan termasuk bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Pemberdayaan keluarga miskin dan penanggulangan kemiskinan tetap menjadi prioritas utama dalam percepatan pemulihan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Susenas 2005, jumlah penduduk miskin di DIY masih cukup besar, yaitu sebesar 275.110 KK (24%). Sampai beberapa tahun ke depan permasalahan sosial ekonomi terus meningkat intensitasnya, antara lain masalah anak terlantar dan korban penyalahgunaan serta peredaran gelap Napza. Untuk itu peningkatan kesejahteraan sosial akan dilaksanakan melalui Program Perlindungan Penyandang Masalah Sosial dan Peningkatan Kepedulian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

Di bidang budaya, pembangunan kebudayaan sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap keragaman budaya, pentingnya toleransi, dan berkembangnya interaksi antarbudaya. Pada saat ini, telah tersusun Rencana Induk Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata yang dapat dijadikan acuan dalam pencapaian program pelestarian dan pengembangan kebudayaan yang terpadu yang merupakan hasil komitmen bersama antar stakeholder, termasuk program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah Kepurbakalaan.

Di bidang kehidupan beragama, kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan berkembang dengan baik. Demikian pula telah tumbuh kesadaran yang kuat di kalangan pemuka agama untuk membangun harmoni sosial dan hubungan intern dan antarumat beragama yang aman, damai, dan saling menghargai. Meskipun demikian peningkatan kesadaran tersebut tidak sepenuhnya menjamin kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya upaya membangun kerukunan intern dan antarumat beragama juga belum berhasil dengan baik terutama di tingkat masyarakat.

## **2. Hukum, Politik dan Pemerintahan**

Berkenaan dengan penegakan supremasi hukum, secara struktural hirarkies, lembaga dan aparat penegak hukum di daerah akan langsung bertanggungjawab kepada pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah tidak memiliki wewenang dalam hal pembinaan lembaga tersebut. Selaku aparatur daerah, yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi DIY adalah koordinasi dan pembinaan hukum sesuai dengan kewenangannya.

Di bidang politik dan pemerintahan ditandai dengan perkembangan demokrasi yang terumuskan dalam format hubungan pusat-daerah berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang pada intinya lebih mendorong kemandirian daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan mengatur mengenai hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota.

Kemajuan demokrasi terlihat dengan berkembangnya kesadaran terhadap hak-hak sah masyarakat dalam kehidupan politik, yang menstimulasi masyarakat lebih jauh untuk aktif berpartisipasi dalam mengambil inisiatif bagi pengelolaan urusan-urusan publik. Perkembangan ini tidak terlepas dari berkembangnya peran partai politik dan masyarakat sipil. Disamping itu, kebebasan pers dan media telah jauh berkembang yang antara lain ditandai dengan adanya peran aktif pers dan media dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

### **3. Ekonomi**

#### **a. Industri dan Perdagangan**

Secara umum struktur industri di DIY didominasi oleh industri kecil (99%), dengan serapan tenaga kerja antara 5–19 orang per unit usaha. Pada tahun 2004 jumlah industri sebesar 78.609 unit, turun 0,30% pada tahun 2005 (78.373 unit). Dari sejumlah industri tersebut, menyerap tenaga kerja sebesar 264.217 orang (2004), naik 0,47% pada tahun 2005 (265.449 orang) dengan nilai investasi sebesar Rp.1,03 triliun (2004), naik 6,37% pada tahun 2005 (Rp.1,09 triliun). Dilihat dari klasifikasinya, didominasi oleh industri kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenisnya serta industri tekstil pakaian jadi dan kulit. Dalam PDRB, laju pertumbuhan sektor industri (industri pengolahan) mengalami penurunan dari 6,38% (2004) menjadi 4,63% (2005).

Kondisinya perdagangan ditunjukkan dengan peningkatan jumlah Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan, dari 26.597 (2004) menjadi 28.0875 (2005), naik 5,56%. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) meningkat 6,06% dari 26.542 (2004) menjadi 28.151 (2005). Pertambahan jumlah SIUP dan TDP ini menggambarkan perkembangan usaha perdagangan di DIY.

Perkembangan ekspor dan impor menunjukkan pada 2004-2005 ekspor mengalami perkembangan, sedangkan impor mengalami penurunan. Perkembangan ekspor ditunjukkan oleh nilai ekspor meningkat 17,34%, besar volume naik 11,77%, jumlah komoditi naik 6,17%, negara tujuan naik 4,35% dan pelaku ekspor meningkat 2,47%. Untuk indikator impor, ditunjukkan oleh nilai impor turun 19,32%, besar volume turun 76,12% dan jumlah komoditi turun 41,67%. Komoditi ekspor utama adalah mebel kayu, pakaian jadi tekstil, kulit disamak, sarung tangan kulit, lampu dan produk tekstil lainnya. Sedangkan komoditi impor meliputi obat penyamak kulit, bahan baku susu, kapas, kulit disamak dan komoditi lain.

#### b. Pertanian

Pertanian berperan dalam perekonomian daerah melalui sumbangannya terhadap PDRB, penerimaan ekspor, penyediaan tenaga kerja, kesempatan kerja, mendukung pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penyediaan pangan daerah. Selain sumbangan tersebut, sektor pertanian juga memiliki kontribusi dalam memperkuat keterkaitan antar industri, konsumsi dan investasi. Dalam upaya mempertahankan ketersediaan pangan, tahun 2005 DIY belum berhasil meningkatkan produktivitas komoditas tanaman padi, tercatat tingkat produktivitasnya menurun sebesar 2,82% dibanding tahun 2004, tetapi untuk jenis komoditas tanaman pangan lainnya meningkat 9,39% untuk produktivitas jagung dan ubi kayu naik sebesar 10,49%, sedang produktifitas tanaman hortikultura juga meningkat 2,4% khususnya bawang merah dan cabe besar.

Di bidang peternakan, peningkatan populasi ternak tercatat cukup berarti, khususnya ternak unggas mencapai 23,37% (9.030.197 menjadi 11.140.720 ekor), sedang ternak besar mencapai 4,16% (250.835 menjadi 261.259 ekor). Keberhasilan pencapaian target didukung oleh Program peningkatan produk dan kualitas peternakan dan Program pengembangan sistem dan usaha agribisnis peternakan.



#### c. Perikanan dan Kelautan

Pembangunan sektor perikanan dan kelautan ditandai dengan produksi ikan konsumsi yang meningkat setiap tahun (rerata 9,9% pertahun) karena terjadinya peningkatan teknologi dan SDM nelayan maupun pembudidayaannya. Demikian pula dengan produksi benih ikan dan udang yang mengalami kenaikan sebesar 27,81% pertahun dan produksi ikan hias meningkat sebesar 37,54% per tahun. Konsumsi ikan per kapita mengalami kenaikan sebesar 5,71% pertahun. Hal ini disebabkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap nilai gizi pada komoditas perikanan meningkat. Untuk Tahun 2005 realisasi pelaksanaan pembangunan bidang Perikanan dan Kelautan melampaui target, dari arah kebijakan peningkatan produksi perikanan budidaya terlampaui sebesar 28,66% dari target 5,48%, sedang peningkatan produksi perikanan tangkap terlampaui sebesar 9,58% dari target 7,69%.

#### d. Kehutanan dan Perkebunan

Kondisi kehutanan ditunjukkan oleh luas hutan sebesar 54.229,467 ha, terdiri dari hutan negara (hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi dan hutan AB) dan hutan rakyat. Luas hutan di DIY baru mencapai 17,02 % dari total luas wilayah (menurut UU No.41/1999 idealnya luas kawasan hutan mencapai 30 %). Pada tahun 2005 target peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan terlampaui sebesar 1,04 % (dari target RP. Rp. 2,175.000.000 milyar menjadi Rp.2.846.253.000) dari sisi peningkatan upaya pelestarian lingkungan melalui rehabilitasi kawasan & konservasi terlampaui 2,59 % (dari target sebesar 8.731,67 ha menjadi 8.943,16 ha) dan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rakyat petani kebun melalui peningkatan produksi komoditas perkebunan terlampaui sebesar 0,81% dari 72.570,43 ton/tahun menjadi 76.081,70 ton/tahun).

Hal-hal yang perlu ditangani dalam pembangunan kehutanan dan perkebunan, meliputi kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan kawasan hutan masih kurang, pemanfaatan bibit unggul dalam penanaman hutan masih terbatas, produksi dan produktifitas tanaman perkebunan belum optimal, produk spesifik perkebunan belum memenuhi permintaan pasar dan kelembagaan petani perlu ditingkatkan.

e. Pariwisata

Kondisi infrastruktur pariwisata menunjukkan jumlah hotel berbintang 35 buah dengan jumlah penginap rata-rata sebanyak kurang lebih 500 ribu per tahun. Jumlah hotel non bintang sebanyak 651 buah, dengan jumlah penginap rata-rata kurang lebih 600 ribu. Total kunjungan wisata melalui hotel rata-rata 1.100.000 terdiri dari wisman dan wisnus. Jumlah obyek wisata sebanyak 112 obyek terdiri dari 26 buah wisata alam, 73 buah wisata budaya dan 13 buah wisata minat khusus. Obyek wisata yang dominan dikunjungi Prambanan, Kaliurang, Gembira loka, Kraton Yogya, Pantai Baron, dengan rata-rata dikunjungi diatas 300 ribu orang. Total kunjungan langsung ke obyek wisata rata-rata 5 juta orang. Keberhasilan pembangunan pariwisata didukung oleh kesiapan *stakeholder* pariwisata yang terdiri dari asosiasi PHRI, ASITA, HPI dan asosiasi lainnya serta pramuwisata yang saat ini berjumlah sekitar 370 orang.

#### **4. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka sumberdaya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan dengan ketentuan ini yang berkaitan dengan sumberdaya alam maka perlu diatur dan dikembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian kegiatan yang mempunyai dampak sosial dan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Di antara permasalahan-permasalahan yang terjadi di Propinsi DIY berkaitan dengan lingkungan hidup, antara lain meliputi kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup. Beberapa jenis kerusakan lingkungan hidup diakibatkan oleh kegiatan pertambangan bahan galian golongan C berupa batu, pasir tanah urug, batu kapur, gamping dan sebagainya baik yang dilakukan oleh masyarakat yang berijin maupun tidak berijin. Penambangan pasir dan batu kali mengakibatkan rusaknya lahan sekitar bantaran sungai. Kerusakan ini dipicu oleh adanya permintaan pasir maupun batu kali yang cukup tinggi.

Selain pada sungai, penggempuran tanah bukit untuk tanah urug merupakan bentuk perusakan lahan yang terjadi dan perlu dikendalikan. Walaupun kerusakan ini sulit untuk dikendalikan karena permintaan tanah urug yang tinggi, sehingga dikhawatirkan akan memperparah kondisi bukit-bukit yang ada.

Kerusakan lebih diakibatkan oleh banyaknya aktifitas pertambangan tanpa ijin sehingga sulit dikendalikan. Selain juga disebabkan oleh perusakan oleh perusahaan pertambangan yang tidak melakukan kewajiban pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam perijinan.

Kerusakan lain terjadi pada wilayah pesisir dan pantai. Di Kabupaten Gunungkidul, pada umumnya berupa perbukitan dengan dinding terjal. Kerusakan akibat abrasi terjadi pada wilayah Sundak dan Krakal, kerusakan ini, selain diakibatkan oleh erosi gelombang dan abrasi, juga ditengarai oleh adanya penambangan pasir marin, eksploitasi/pengambilan daun pandan yang berfungsi sebagai buffer/jalur hijau, serta pengambilan terumbu karang.

Perkembangan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Sleman khususnya yang berdampak terhadap perubahan lahan (konversi lahan) berpengaruh cukup signifikan terhadap ketersediaan air tanah di wilayah bawahnya. Tekanan terhadap konversi ini perlu terus dikendalikan yang lebih ketat, di samping itu perlu langkah-langkah untuk tetap terjaganya fungsi kawasan resapan air.

Permasalahan lingkungan yang terjadi di perkotaan Yogyakarta secara umum berupa penurunan kualitas udara akibat transportasi. Berbagai aktifitas telah diupayakan untuk upaya menekan laju penurunan kualitas udara, antara lain dengan pemeriksaan kualitas udara ambien secara berkala, pengecekan uji emisi kendaraan bermotor, penghijauan dan sebagainya. Namun usaha-usaha tersebut perlu terus ditingkatkan mengingat jumlah sumber pencemar yang juga semakin tinggi.

Di samping permasalahan-permasalahan di atas, kualitas air juga menjadi permasalahan yang perlu menjadi perhatian. Hasil pemantauan yang dilakukan oleh BAPEDALDA terhadap beberapa sampel sumur penduduk yang berdekatan dengan usaha/industri pada tahun 2004 dan 2005, menunjukkan bahwa pada beberapa sumur terdapat sumur-sumur yang kadarnya melebihi batas syarat. Sumur-sumur yang diamati meliputi sumur yang berdekatan dengan industri tekstil, ternak babi, industri kulit, industri perak, pelapisan logam, susu, gula, dan pom bensin. Dari 21 parameter kimia, pada beberapa sumur terdapat parameter yang melebihi batas syarat. Di antara yang melebihi syarat adalah parameter Mangan (Mn), Besi (Fe), Amonia (NH<sub>3</sub>), serta Minyak dan Lemak. Parameter Mn terpantau pada sumur yang berdekatan dengan

industri tekstil, ternak babi, industri perak, pelapisan logam, pabrik susu, pabrik gula, kulit, dan pom bensin. Parameter besi (Fe) terpantau pada sampel sumur penduduk dekat dengan usaha kegiatan ternak babi, usaha pelapisan logam, pabrik gula, dan pom bensin. Amonia (NH<sub>3</sub>) terpantau pada salah satu sampel sumur yang berdekatan dengan usaha kegiatan pelapisan logam. Sedangkan Minyak dan lemak terpantau pada beberapa sampel sumur penduduk yang berdekatan dengan usaha pom bensin.

Hasil pemantauan kualitas air sungai pada tiga sungai utama yang melintasi perkotaan Yogyakarta yakni S.Code, S.Winongo, dan S.Gajahwong menunjukkan bahwa jumlah bakteri koli tinja dan jumlah bakteri total koli jauh melebihi ambang batas walaupun pengukuran dilakukan bagian atas sekalipun (sampel paling atas: Code-di Boyong Sleman, Winongo-di Turi Sleman, dan Gajahwong-di Hargobinangun Sleman).

## **5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) terus menerus berjalan yang sebagian besar dilaksanakan oleh para akademisi di perguruan tinggi, baik dosen maupun mahasiswa. Di instansi pemerintah kegiatan penelitian iptek dilaksanakan dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelaksanaan tugas. Sejalan dengan itu berbagai publikasi ilmiah juga terus berkembang. Namun demikian pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan iptek dapat dikatakan masih rendah yang disebabkan antara lain oleh belum efektifnya intermediasi, lemahnya sinergi kebijakan antara pengembang dan pemakai iptek, belum berkembangnya budaya iptek dan masih terbatasnya sumber daya iptek. Di sisi lain pengembangan dan pemanfaatan iptek, terutama teknologi informasi (TI), dalam lima tahun terakhir ini telah berkembang pesat di Provinsi DIY.

Perkembangan pemanfaatan TI ditandai dengan makin banyaknya masyarakat, instansi pemerintah dan perguruan tinggi menggunakan komputer dan internet, terutama untuk memperoleh informasi. Indikator pemanfaatan IT menunjukkan angka Literate IT di DIY pada tahun 2005 sebesar 17%. Pengembangan IT, terutama perangkat lunak (software) banyak dilakukan oleh swasta dan perguruan tinggi yang ditandai dengan makin berkembangnya pengelola jasa pengembangan IT.

## 6. Penataan Ruang

Provinsi DIY merupakan bagian dari ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berwujud sumber daya alam dengan keanekaragaman ekosistemnya perlu dimanfaatkan secara optimal, di samping harus dilindungi agar tetap serasi, seimbang dan berkelanjutan. Agar pemanfaatan dan perlindungan ruang dapat dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasilguna perlu perumusan penetapan pokok-pokok kebijakan dan strategi pengembangan dalam suatu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 5 Tahun 1992, merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1992, dan merupakan dasar penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota serta penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY, berlaku untuk jangka waktu 15 tahun, yaitu Tahun 1992 – 2007. Berkaitan dengan hal ini, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan searah dengan perkembangan situasi dan kondisi terutama karena perubahan paradigma sistem tata pemerintahan yaitu adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perubahan kondisi perekonomian yang mengalami krisis sejak Tahun 1997, dan perkembangan kebijakan globalisasi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY telah dilakukan pengkajian dan peninjauan kembali pada Tahun 1997 dan Tahun 2002.

Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY yang dilakukan pada Tahun 2002, meliputi: evaluasi aspek norma yaitu mengevaluasi kesesuaian produk hukum dengan realita, evaluasi *summative* yang meliputi evaluasi konsep, asumsi dan metode versus tantangan/sistem yang berlaku, dan evaluasi implementasi yaitu mengevaluasi antara komitmen versus kapasitas. Implikasi operasional Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY yang cukup penting dalam evaluasi ini adalah mengefektifkan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang ditekankan pada :

- a. Imbangan otonomi daerah, yaitu kaitan antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

- b. Aspek peranserta masyarakat dalam proses penataan ruang wilayah yang mencakup proses perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengawasan/pengendalian tata ruang wilayah.
- c. Aspek pengawasan/pengendalian pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY dalam kerangka pencapaian tujuan penataan ruang wilayah nasional.

Sampai dengan saat ini, hasil peninjauan kembali RTRW Provinsi DIY tersebut diatas telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **C. Kondisi Daerah Pasca Bencana**

Pada waktu yang hampir bersamaan bencana alam telah menggoncang Propinsi DIY, yaitu bencana gempa bumi dan bencana meletusnya G. Merapi. Bencana alam meletusnya G. Merapi telah mengakibatkan kerugian dan kerusakan di wilayah Kabupaten Sleman, sedangkan bencana gempa bumi berkekuatan 6,2 skala Richter (versi USGS) yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 telah mengakibatkan banyak kerugian dan kerusakan, baik korban jiwa, kerusakan fisik dan kerusakan psiko-sosial hampir di seluruh wilayah Propinsi DIY. Kerugian terbesar terjadi di Kabupaten Bantul, karena wilayah tersebut merupakan daerah yang paling dekat dengan pusat gempa. Berdasarkan data tanggal 24 Juli 2006 di seluruh Provinsi DIY tercatat jumlah korban meninggal 5.048 jiwa, terperinci Yogyakarta 218 jiwa, Bantul 4.480 jiwa, Kulon Progo 23 jiwa, Gunungkidul 84 jiwa dan Sleman 243 jiwa. Kondisi setelah terjadinya bencana alam gempa bumi dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Kerusakan Bangunan Permukiman**

Kerusakan bangunan rumah tercatat 110.335 rumah rata tanah/rusak berat, dengan rincian Yogyakarta 6.095 rumah, Bantul 73.050 rumah, Kulon Progo 4.623 rumah, Gunungkidul 7.454 rumah dan Sleman 19.113 rumah), 96.169 rumah rusak sedang (Yogyakarta 8.408 rumah, Bantul 71.532 rumah, Kulon Progo 5.196 rumah dan Gunungkidul 11.033) dan 193.731 rumah rusak ringan (Yogyakarta 15.364 rumah, Bantul 65.356 rumah, Kulon Progo 9.041 rumah, Gunungkidul 27.218 rumah dan Sleman 76.752 rumah). Kerusakan rumah di Bantul diperkirakan 45% total rumah roboh atau rusak berat.

## **2. Kerusakan Bangunan Fasilitas Umum**

### **a. Pendidikan**

Jumlah bangunan pendidikan di Provinsi DIY sebelum bencana gempa bumi tercatat 4.774 sekolah, yang terdiri dari bangunan TK: 1.901 unit, SD : 2.104 unit, SMP/MTS: 432 unit, SMA/MA: 190 unit, SMK: 147 unit dan Perguruan Tinggi: 100 unit. Gempa tektonik yang terjadi telah mengakibatkan kerusakan bangunan pendidikan sejumlah: 1.844 unit atau 38,62 % dari total bangunan pendidikan yang ada. Kerusakan tersebut terdiri dari bangunan TK: 353, SD/MI: 936/104, SMP/MTs: 179/61, SMA: 64, SMK: 70, dan Perguruan Tinggi: 54. Berdasarkan kondisi bangunan rusak, fasilitas bangunan yang rusak total 275 unit, rusak berat 777 unit, dan rusak ringan 794 unit.

### **b. Kesehatan**

Jumlah sarana dan prasarana bangunan kesehatan di Provinsi DIY sebelum terjadinya bencana gempa bumi terdiri dari RS. Umum: 22 unit, RS Khusus: 18 unit, Puskesmas: 124 unit, Puskesmas Pembantu: 304 unit, Puskesmas Keliling: 38 unit, dan Balai Pengobatan: 35 unit. Gempa tektonik yang terjadi menyebabkan kerusakan pada bangunan sarana dan prasarana kesehatan, yang terdiri dari bangunan puskesmas: 79 unit, puskesmas pembantu: 122 unit, rumah dinas dokter dan paramedis: 84 unit, bangunan Dinas Kesehatan: 3 unit, bangunan RS Daerah: 1 unit, balai pengobatan dan polindes: 3 unit, dan bangunan kesehatan lainnya: 5 unit. Kerusakan fasilitas kesehatan terbanyak ada di Kabupaten Bantul, yang meliputi: kerusakan puskesmas: 28 unit, puskesmas pembantu: 51 unit, rumah dinas dokter dan paramedis 24 unit, Kantor Dinas Kesehatan Bantul, serta RSUD Kabupaten Bantul.

### **c. Pariwisata dan Budaya**

Pasca bencana gempa bumi asset-asset yang mengalami kerusakan meliputi KCB dan BCB seperti kompleks candi, kraton, makam raja-raja baik di Kotagede maupun di Imogiri, situs budaya lainnya, balai arkeologi, serta kantor-kantor dan sarana-prasarana lainnya yang menunjang sektor pariwisata dan budaya seperti hotel berbintang dan hotel melati.

Situs budaya yang rusak akibat gempa terdiri dari 23 situs budaya yang *tangible* (bangunan pusaka individu dan kompleks), 7 situs budaya *intangible*, 1 situs budaya saujana (*cultural landscape heritage*) dan situs candi.

### **3. Infrastruktur**

#### **a. Jalan dan Jembatan**

Kerusakan-kerusakan pada sektor prasarana perhubungan, khususnya jalan dan jembatan meliputi beberapa ruas jalan patah dan pecah-pecah, baik sisi kiri maupun kanan jalan akibat talud yang runtuh dan penurunan/kenaikkan permukaan serta badan jalan. Pada jembatan umumnya terjadi kerusakan pada *expansion joint* dan pergeseran.

#### **b. Perhubungan Darat**

Perhubungan darat yang mengalami kerusakan adalah prasarana perkereta-apian, antara lain jalan rel bergeser dan ambles, jembatan jalan rel ambles, bangunan stasiun, mess/wisma, perkantoran, depo lok dan kereta, serta instalasi sintelis (sinyal, telkom, dan listrik).

#### **c. Perhubungan Udara**

Sektor perhubungan udara yang mengalami kerusakan adalah prasarana di Bandara Adisucipto, antara lain *runway*, jaringan listrik, ruang tunggu domestik, terminal kedatangan domestik, *check-in area* dan *lobby* terminal.

#### **d. Air Bersih**

Akibat gempa, beberapa pipa PDAM mengalami kebocoran dan pecah. Kerusakan terjadi pada instalasi air bersih di kawasan Yogyakarta bagian selatan (Kraton, Umbulharjo dan Kotagede) dan Bantul. Di samping itu sumur warga mengalami kekeruhan, runtuh dan kekeringan akibat dasar sumur naik.



e. Sanitasi dan Air Limbah

Kurang lebih 2 % masyarakat DIY dilayani dengan sistem air limbah terpusat, sistem ini baru mencakup wilayah perkotaan Yogyakarta, yang terdiri atas jaringan lateral dan sistem penggelontoran yang dibangun pada tahun 1926, dan sistem Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang dibangun pada tahun 1995. Akibat gempa kurang lebih 1 juta jiwa yang berada pada kawasan Bantul, Sleman dan Yogyakarta terganggu kebutuhan fasilitas MCK-nya.

f. Listrik

Akibat bencana gempa bumi, dari sejumlah 6,7 juta pelanggan PLN di DIY-Jateng, diperkirakan lebih dari 14.000 sambungan listrik rusak.

#### **4. Ekonomi**

Sektor perekonomian yang terkena dampak langsung terhadap bencana gempa bumi adalah pertanian, industri (kecil dan menengah), pariwisata dan perdagangan. Dampak bencana pada sektor pertanian menyebabkan menurunnya produksi pertanian, akibat rusaknya infrastruktur pertanian, seperti bangunan irigasi. Pada sektor industri kecil dan menengah jumlah kerugian mencapai lebih dari 50 % dari total jumlah industri yang ada, terutama di Kabupaten bantul, seperti industri kerajinan kulit, gerabah, genteng, perak dan industri kecil makanan. Sektor perdagangan yang mengalami kerugian adalah rusaknya bangunan pasar tradisional.

Bencana gempa bumi tidak hanya menyebabkan kerusakan pada bangunan para pelaku usaha, tetapi juga mengakibatkan kerusakan pada potensi pasar. Diperkirakan potensi kehilangan pasar para pelaku usaha mencapai 34%. Pasca bencana gempa bumi, perekonomian Provinsi DIY akan mengalami kontraksi, akibat terganggunya proses produksi atau penciptaan nilai tambah pada dua sektor unggulan, yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Walaupun bencana gempa bumi telah mengakibatkan kerusakan dan gangguan, tetapi pada beberapa wilayah tertentu menunjukkan kondisi yang masih normal.

## **D. Masalah dan Tantangan**

### **1. Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata**

#### **a. Pendidikan**

- 1) Kesempatan memperoleh pendidikan belum merata dan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum belum mantap;
- 2) Sarana-prasarana pendidikan yang rusak akibat gempa dan penunjang pendidikan serta proses pembelajaran yang terganggu dan belum mantap;
- 3) Penyelenggaraan sekolah dan lembaga pendidikan luar sekolah berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen belum mantap;
- 4) Kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah, dan keterpaduan program pembangunan bidang pendidikan beserta penunjangnya dengan bidang lain belum optimal;
- 5) Peran pemuda dalam masyarakat dan di bidang olahraga kurang optimal.

#### **b. Kebudayaan**

- 1) Rusak dan hilangnya asset budaya (*tangible culture*) akibat gempa.
- 2) Pengembangan dan pembinaan kebudayaan daerah, maupun pengembangan kesenian dan kebudayaan sebagai aset wisata budaya belum optimal, serta sikap kritis masyarakat terhadap nilai-nilai budaya belum berkembang.
- 3) Kurang optimalnya perumusan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal, serta pelestarian apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan masyarakat.

#### **c. Pariwisata**

- 1) Belum pulihnya asset wisata budaya akibat gempa.
- 2) Belum intensifnya koordinasi program antar kabupaten/kota dengan Provinsi dalam rangka optimalisasi obyek wisata
- 3) Promosi terpadu (kab/kota dan pelaku pariwisata) belum terarah pada segmen pasar.
- 4) Belum optimalnya dukungan program pengembangan pariwisata lintas sektor, serta pengembangan pariwisata berbasis komunitas/ masyarakat lingkungannya.

## **2. Kesehatan**

- a. Tingginya angka kematian balita dan ibu bersalin serta angka kesakitan;
- b. Penyakit degeneratif terus meningkat, sedang penyakit infeksi seperti DHF, TBC masih laten;
- c. HIV/AIDS, penyalahgunaan NAPZA cenderung meningkat;
- d. Kurang diutamakannya aspek pemeliharaan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, serta kurangnya dukungan kerjasama lintas sektor dalam upaya peningkatan derajat kesehatan;
- e. Rendahnya mutu pelayanan dan persebaran sarana pelayanan kesehatan ke pelosok wilayah;
- f. Rendahnya pemberdayaan atau kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan terutama dalam rangka pemberdayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- g. Kualitas lingkungan masih rendah
- h. Rendahnya kualitas gizi masyarakat
- i. Perlunya peningkatan pelayanan kesehatan umum dan khusus termasuk jiwa

## **3. Sosial**

- a. Belum terpenuhinya kebutuhan dasar manusia (pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan interaksi sosial) akibat gempa;
- b. Meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) antara lain pengemis, gelandangan, fakir miskin, penyandang cacat, anak terlantar (anak jalanan) serta penduduk usia lanjut yang terlantar;
- c. Munculnya penyimpangan sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat;
- d. Kurangnya pemberian kesempatan berkembangnya kesetaraan gender dalam setiap aspek kehidupan;
- e. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- f. Munculnya bencana sosial akibat bencana alam.
- g. Masih terdapatnya peraturan perundang-undangan yang masih bias gender.

## **4. Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur**

- a. Penataan Ruang
  - 1) Kesenjangan pertumbuhan wilayah (antar kawasan, antara wilayah tengah dengan wilayah barat dan timur, serta bagian tengah/utara dengan selatan);

- 2) Tekanan eksploitasi terhadap sumber daya alam/perubahan fungsi lahan;
- 3) Dokumen penataan ruang masih terbatas pada tingkat makro (RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan RTRW belum dapat berfungsi sepenuhnya sebagai dokumen publik;
- 4) Pola pemanfaatan ruang khususnya pada wilayah perkotaan yang cenderung tidak teratur;
- 5) Pertumbuhan permukiman pada kiri-kanan jalan utama sehingga fungsi jalan kurang optimal;
- 6) Pengendalian pemanfaatan ruang yang masih kurang efektif

b. Lingkungan Hidup

- 1) Degradasi lahan akibat aktivitas manusia;
- 2) Pencemaran akibat pembuangan limbah cair terutama dari kegiatan industri, pariwisata & pelayanan kesehatan maupun limbah padat B3, penggunaan pestisida pada pertanian, maupun kerusakan akibat penambangan bahan galian golongan A dan C terutama pada kawasan karst;
- 3) Tingkat pencemaran hidrokarbon diatas ambang batas baku mutu udara;
- 4) Tingkat pencemaran pada air sumur & sungai-sungai yang melintasi kota sebagian besar sudah diatas ambang batas baku mutu untuk parameter BOD, COD dan bakteri coli (air sumur);
- 5) Belum efektifnya penegakan hukum lingkungan. Belum efektifnya koordinasi antar sektor khususnya dokumen AMDAL yang belum masuk dalam persyaratan IMB.

c. Infrastruktur

- 1) Belum efektifnya koordinasi pengelolaan transportasi udara, transportasi darat, pos dan telekomunikasi, prasarana permukiman, sumberdaya air, prasarana jalan antar kewenangan, antar sektor, antar wilayah belum efektif;
- 2) Tingginya volume pendaratan kapal dan kurangnya tingkat keselamatan pelayaran;
- 3) Kondisi sanitasi perkotaan sebagian besar kurang memenuhi syarat. Pemanfaatan jaringan pembuangan air limbah terpusat perlu dioptimalkan, serta sistem Drainase perkotaan Yogyakarta masih perlu dikembangkan untuk mengatasi permasalahan genangan-genangan air hujan termasuk aspek kewenangan;

- 4) Terjadinya ketimpangan Neraca Air, antara ketersediaan dan kebutuhan air, berkaitan dengan kuantitas, kualitas, ruang, waktu.

## **5. Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan**

### **a. Pertanian**

- 1) Berkurangnya luas lahan pertanian akibat alih fungsi lahan;
- 2) Terbatasnya akses terhadap permodalan;
- 3) Berkurangnya luas lahan pertanian
- 4) Terbatasnya akses terhadap permodalan;
- 5) Produksi dan produktivitas pertanian belum dapat memenuhi permintaan pasar;
- 6) Rendahnya daya saing produk pertanian;
- 7) Profesionalisme SDM pertanian masih rendah;
- 8) Inovasi dan adopsi teknologi masih terbatas.

### **b. Kehutanan dan Perkebunan**

- 1) Produktivitas tanaman kehutanan dan komoditas perkebunan, masih rendah.
- 2) Terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan petani, sarana-, prasarana dan teknologi pengolahan hasil untuk mendukung produk berdaya saing;
- 3) Profesionalisme aparat kehutanan masih perlu ditingkatkan untuk perangkat mendukung pelayanan prima;
- 4) Terbatasnya jejaring kemitraan usaha agribisnis;
- 5) Maraknya penjarahan/penebangan kayu illegal;
- 6) Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap usaha konservasi hutan, lahan, flora dan fauna.

### **c. Perikanan dan Kelautan**

- 1) Belum optimalnya pengelolaan laut dan pesisir termasuk implementasi peraturan pendukung kegiatan tersebut.
- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya tambak ikan/udang.
- 3) Belum adanya dermaga pelabuhan yang memadai sebagai tempat berlabuh kapal-kapal besar/kapal mesin untuk mengurangi eksploitasi penangkapan di Jalur I karena sudah mendekati *over fishing*;

- 4) Belum optimalnya peran pelaku pembangunan perikanan karena sebagian nelayan/pembudidaya ikan bersifat tradisional serta usaha yang dijalankannya masih merupakan mata pencaharian sampingan;
- 5) Belum tersedianya alur data dan sistem informasi yang memadai di tingkat lapangan;
- 6) Terbatasnya akses pasar domestik lokal, regional dan internasional.

## **6. Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi**

### **a. Perindustrian**

- 1) Terbatasnya kemampuan dan ketrampilan sumberdaya manusia dalam usaha peningkatan produktivitas, mutu dan diversifikasi produk
- 2) Lemahnya kemampuan usaha kecil menengah dalam mengakses ke sumber-sumber permodalan untuk pengembangan usaha
- 3) Keterbatasan dalam memperoleh bahan baku dari lokal dan suplai yang tidak kontinyu

### **b. Perdagangan**

- 1) Kurangnya kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen;
- 2) Terbatasnya jumlah sumberdaya manusia yang mempunyai kualifikasi sebagai PPNS dalam rangka penegakan UU Perdagangan;
- 3) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan produk dalam negeri;
- 4) Rendahnya posisi tawar produk KUKM;
- 5) Hambatan non tarif sangat berpengaruh terhadap daya saing produk ekspor.

### **c. Koperasi**

- 1) Rendahnya tingkat kesadaran anggota dalam pengembangan koperasi
- 2) Kurangnya kemampuan manajerial dalam pengelolaan KUKM
- 3) Rendahnya akses KUKM terhadap sumber permodalan.

d. Pertambangan dan Energi

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan pertambangan rakyat yang mengakibatkan menurunnya kelestarian fungsi lingkungan;
- 2) Masih terdapat daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan listrik.

**7. Informasi dan Telematika**

- a. Belum terwujudnya pembangunan sistem komunikasi dan informasi serta media massa yang diarahkan pada keterbukaan, bertanggungjawab, dan profesional;
- b. Belum optimalnya pelayanan informasi kepada masyarakat;
- c. Terbatasnya sumberdaya manusia dan sarana-prasarana pendukung layanan informatika (*out of date*).

**8. Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

- a. Ketenagakerjaan
  - 1) Terbatasnya kesempatan dan peluang kerja yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran;
  - 2) Rendahnya Kualitas Ketrampilan Tenaga Kerja;
  - 3) Terbatasnya Informasi Pasar Kerja;
  - 4) Terbatasnya sarana dan prasarana pelatihan di BLK sehingga belum dapat mengantisipasi pasar kerja;
  - 5) Rendahnya Perlindungan Tenaga Kerja.
- b. Ketransmigrasian
  - 1) Tingginya jumlah penduduk dan persebaran yang tidak merata;
  - 2) Meningkatnya jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan;
  - 3) Terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah serta masih tingginya angka kemiskinan.

**9. Kapasitas Daerah**

- a. Belum optimalnya pengembangan kualitas pegawai, kaderisasi pimpinan, dan manajemen sumberdaya manusia/kepegawaian, serta penataan kelembagaan;
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dengan sistem Informasi Teknologi yang canggih namun ramah lingkungan;

- c. Belum optimalnya kerjasama yang telah disepakati, baik kerjasama dalam negeri maupun kerjasama luar negeri;
- d. Belum adanya koordinasi dan sinkronisasi yang baik dari semua instansi dalam menangani seluruh masalah peningkatan dan pengembangan Kapasitas Daerah;
- e. Belum terbahasnya RUU Keistimewaan DIY di Pemerintah Pusat;
- f. Belum adanya kesepahaman persepsi tentang pelaksanaan otonomi daerah antara pusat dan daerah, dan antar daerah itu sendiri;
- g. Penatausahaan dan penerbitan dokumen-dokumen mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan (termasuk dokumen RAPBD dan APBD) begitu lamban, yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan;
- h. Minimnya investasi/investor yang mengembangkan usahanya di DIY, karena kondisi infrastruktur yang menunjang belum terbangun secara maksimal;
- i. Kurangnya koordinasi dari semua instansi dalam penegakan hukum;
- j. Belum adanya pelayanan yang baik karena belum terciptanya aparatur yang profesional;
- k. Belum selesainya penyusunan formasi pegawai yang menghambat perencanaan dan pengembangan aparatur.

## **II. GAMBARAN UMUM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**

### **A. Tema Pembangunan**

Dengan mengacu pada Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004–2008, Rencana Kerja Pemerintah RI Tahun 2007, Hasil Forum SKPD Provinsi DIY Tahun 2006 dan kondisi nyata yang dihadapi pada saat ini maka ditetapkan tema pembangunan Provinsi DIY pada tahun 2007 adalah ***Pembangunan kembali Provinsi DIY untuk perkuatan ekonomi daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan dan kebijakan yang berpihak pada rakyat demi mewujudkan masyarakat yang kompetitif.***

Langkah-langkah dalam penanganan akibat bencana alam gempa bumi di Provinsi DIY dilakukan dalam tiga tahap, yaitu Tanggap Darurat, Perbaikan (Rehabilitasi) dan Pembangunan kembali (Rekonstruksi).



Tahap Tanggap Darurat berlangsung selama 40 hari sejak terjadinya bencana. Tahap Rehabilitasi berlangsung setelah Tanggap Darurat sampai dengan akhir Tahun 2006. Tahap Rekonstruksi direncanakan pada Tahun 2007 dan Tahun 2008. Berdasarkan tahapan tersebut maka pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2007 adalah tahap pembangunan kembali setelah terjadi gempa, sehingga mengambil tema seperti tersebut di atas.

Berdasarkan tema tersebut kebijakan umum yang ditempuh adalah:

1. Pemulihan sistem secara keseluruhan terhadap daerah yang terkena dampak bencana alam
2. Integrasi program-program pembangunan daerah (dengan kabupaten/ kota) terkait dengan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa
3. Melanjutkan program-program Strategis yang mendukung dan mempercepat tercapainya sasaran Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
6. Meningkatkan kualitas daya saing produk daerah untuk mendukung terwujudnya masyarakat kompetitif

Berdasarkan kebijakan umum, maka strategi daerah yang diambil adalah:

1. Pembangunan kembali sistem ekonomi (produksi, perdagangan dan perbankan)
2. Rekonstruksi sistem transportasi
3. Pemberdayaan sistem sosial dan budaya
4. Perbaikan infrastruktur pendidikan dan kesehatan
5. Pemulihan sistem kelembagaan

## **B. Prioritas Pembangunan**

Guna mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut di atas, dan juga pencapaian visi pemerintah daerah, maka prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2007 adalah:

1. Menekan pertambahan penduduk miskin akibat gempa dan sekaligus menekan angka kemiskinan melalui penyediaan Kesempatan Kerja pada Program-program Rekonstruksi Dampak Gempa Bumi;

2. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan dalam Pembangunan Perdesaan;
3. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas Pendidikan serta Rekonstruksi Infrastruktur pendidikan dan normalisasi proses belajar/mengajar;
4. Peningkatan aksesibilitas, kualitas, dan pelayanan Kesehatan serta Rekonstruksi Infrastruktur kesehatan;
5. Pemberdayaan UMKM melalui perkuatan modal dan rekonstruksi prasarana/sarana produksi;
6. Kampanye Investasi dan Daya Saing Ekspor;
7. Penegakan Hukum dan Revitalisasi Kapasitas Kelembagaan;
8. Rekonstruksi dan Peningkatan Infrastruktur Publik;
9. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Penentuan prioritas pembangunan tersebut mengacu kepada prioritas RKP Tahun 2007, yakni:

1. Penanggulangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kesempatan Kerja, Investasi, dan Ekspor;
3. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Pembangunan Perdesaan;
4. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan;
5. Penegakan Hukum dan HAM, Pemberantasan Korupsi, dan Reformasi Birokrasi;
6. Penguatan Kemampuan Pertahanan, Pemantapan Keamanan dan Ketertiban, serta Penyelesaian Konflik;
7. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana;
8. Percepatan Pembangunan Infrastruktur;
9. Pembangunan Daerah Perbatasan dan Wilayah Terisolir.

Disamping itu, prioritas pembangunan sudah sinkron dengan 8 tujuan *Millennium Development Goals*, yang terdiri dari:

1. Menghapuskan kemiskinan dan kelaparan;
2. Menyediakan pelayanan Pendidikan Dasar untuk semua;
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
4. Menurunkan angka kematian anak;
5. Meningkatkan kesehatan ibu;
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya;
7. Memastikan keberlanjutan lingkungan hidup;
8. Membangun kemitraan global dalam pembangunan.

Begitu pula halnya dengan RKPD Tahun 2007 yang sudah selaras dengan prioritas pembangunan dalam KUA. Adapun prioritas pembangunan dalam RKPD Tahun 2007 adalah:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kesempatan Kerja;
3. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan dalam Pembangunan Perdesaan;
4. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan;
5. Pengembangan UMKM;
6. Peningkatan Investasi dan Daya saing Ekspor;
7. Penegakan Hukum dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan;
8. Pemeliharaan dan Pembangunan Infrastruktur;
9. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Adapun permasalahan, sasaran, dan kebijakan dalam kesembilan prioritas pembangunan dalam KUA adalah sebagai berikut :

**1. Menekan pertambahan penduduk miskin akibat gempa dan sekaligus menekan Angka Kemiskinan melalui penyediaan Kesempatan Kerja pada Program-program Rekonstruksi Dampak Gempa Bumi**

a. Permasalahan

- 1) Jumlah penduduk miskin di DIY masih cukup besar, yaitu 275.110 KK atau 24% dari jumlah penduduk (Data Sosial Ekonomi 2005 BPS), yang terdiri dari: Gunung Kidul: 95.722 KK, Kulon Progo: 42.345 KK, Bantul: 64.386 KK, Sleman: 52.976 KK dan Kota Yogyakarta: 19.681 KK. Dengan terjadinya bencana gempa diprediksi jumlah penduduk miskin akan meningkat tajam.

- 2) Jumlah penganggur di DIY masih cukup tinggi, yaitu 5,05% dari jumlah penduduk (Susenas 2005), dengan rincian sebagai berikut:

▪ Penduduk	: 3.243.277 orang
▪ Penduduk Usia Kerja	: 2.573.019 orang
▪ Angkatan Kerja	: 1.851.209 orang
▪ Bekerja	: 1.757.702 orang
▪ Penganggur Terbuka	: 93.507 orang
▪ Setengah Penganggur	: 466.396 orang

dengan terjadinya bencana gempa, jumlah penganggur (pengangguran terbuka) akan meningkat tajam.

b. Sasaran

- 1) Menekan pertumbuhan dan sekaligus mengurangi jumlah penduduk miskin
- 2) Pengurangan Angka Pengangguran Terbuka

c. Kebijakan

- 1) Pemenuhan kebutuhan dasar dalam bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, pangan dan gizi, lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha.
- 2) Pemberdayaan untuk:
  - Membuka kesempatan berpartisipasi bagi masyarakat miskin dalam proses pembangunan
  - Meningkatkan peluang dan posisi tawar masyarakat miskin
- 3) Pemberian bantuan dan jaminan sosial.
- 4) Peningkatan kesempatan kerja yang difokuskan pada penciptaan pasar tenaga kerja yang kompeten.

**2. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan dalam Pembangunan Perdesaan**

a. Permasalahan

- 1) Rusaknya infrastruktur pendukung
- 2) Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang berdampak pada penyediaan pangan
- 3) Rumah tangga pertanian sebesar 80,29% merupakan petani gurem, dengan pemilikan lahan kurang dari 0,5 ha
- 4) Rendahnya daya saing produk
- 5) Pemanfaatan bibit berkualitas belum optimal
- 6) Produksi dan produktivitas tanaman masih belum optimal
- 7) Produk spesifik aneka olahan belum memenuhi permintaan pasar
- 8) Sarana pelabuhan kurang memadai (perikanan)
- 9) Masih rendahnya inovasi dan adopsi teknologi
- 10) Belum mantapnya manajemen kelembagaan petani
- 11) Akses permodalan masih terbatas
- 12) Sarana peningkatan mutu hasil produksi belum memadai.
- 13) Ketergantungan masyarakat sekitar hutan terhadap hutan yang lebih mengutamakan fungsi ekonomi dibanding fungsi sosial dan ekologi.

b. Sasaran

Peningkatan produk dan produktivitas pertanian, perikanan, dan perkebunan serta konservasi hutan dan lahan.

c. Kebijakan

- 1) Perbaikan infrastruktur yang rusak akibat gempa
- 2) Peningkatan ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing produk
- 3) Peningkatan pemberdayaan petani/nelayan
- 4) Memberikan lapangan kerja dan berusaha terutama bagi penduduk miskin di perdesaan
- 5) Meningkatkan pendapatan petani/nelayan melalui peningkatan sarana prasarana dan akses permodalan
- 6) Pengembangan agribisnis pertanian
- 7) Optimalisasi fungsi hutan dan lahan
- 8) Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM serta kelembagaan pertanian/usaha pembudidaya ikan
- 9) Pengembangan pertanian berkelanjutan.

**3. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas Pendidikan serta Rekonstruksi Infrastruktur pendidikan dan normalisasi proses belajar/ mengajar**

a. Permasalahan

- 1) Banyaknya sarana dan prasarana pendidikan yang rusak akibat gempa.
- 2) Akses dan kualitas pendidikan yang harus ditingkatkan.
- 3) Adanya anak usia sekolah yang belum tertampung di sekolah (SLB: 1391 ABK, PAUD: 188.642 anak)
- 4) Belum optimalnya penanganan anak putus sekolah untuk dikembalikan ke sekolah (SD/MI: 0,19%, SMP/MTs:0,51%, SM/MA: 0,53%)
- 5) Sebagian penduduk tidak dapat menjangkau biaya pendidikan yang dirasakan mahal
- 6) Belum terlaksananya sistem pembiayaan pendidikan yang berkeadilan secara baik

b. Sasaran

- 1) Mengembalikan Kegiatan Belajar Mengajar pada posisi sebelum gempa
- 2) Meningkatkan penduduk yang mendapatkan pelayanan dan fasilitasi pendidikan.
- 3) Meningkatkan mutu pendidikan untuk memudahkan mengakses anak didik/lulusan sekolah terhadap dunia kerja.

c. Kebijakan

- 1) Rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah dasar.
- 2) Fasilitasi pendidikan agama.

- 3) Fasilitasi rehabilitasi ringan SMP (berupa bantuan).
- 4) Pemerataan dan perluasan kesempatan dan kemudahan memperoleh pendidikan terutama bagi masyarakat yang tidak mampu
- 5) Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan melalui peningkatan anggaran pendidikan dan kesejahteraan bagi pelaku pendidikan
- 6) Pemantapan pelaksanaan tata kelola yang baik.

#### **4. Peningkatan aksesibilitas, kualitas, dan pelayanan Kesehatan serta Rekonstruksi Infrastruktur kesehatan**

##### **a. Permasalahan**

- 1) Banyaknya sarana dan prasarana kesehatan yang rusak akibat gempa.
- 2) Akses dan kualitas kesehatan yang masih rendah
- 3) Beban ganda pelayanan kesehatan
- 4) Mutu pelayanan kesehatan belum optimal
- 5) Pembiayaan kesehatan belum terjangkau masyarakat miskin
- 6) Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat belum optimal

##### **b. Sasaran**

- 1) Pelayanan kesehatan bagi korban gempa
- 2) Meningkatnya masyarakat yang memperoleh layanan kesehatan
- 3) Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit malaria, demam berdarah dengue, TBC, paru, diare, flu burung, HIV/AIDS

##### **c. Kebijakan**

- 1) Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana kesehatan.
- 2) Pelayanan kesehatan bagi korban gempa (Rehabilitasi cacat, pelayanan medis rawat inap dan rawat jalan) sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi
- 3) Peningkatan pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat yang kurang mampu
- 4) Peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah
- 5) Penangan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil, bayi dan balita
- 6) Peningkatan ketersediaan obat dan pengawasan obat
- 7) Peningkatan mutu pelayanan dan promosi kesehatan

## **5. Pemberdayaan UMKM melalui perkuatan modal dan rekonstruksi prasarana/sarana produksi**

- a. Permasalahan
  - 1) Rusaknya infrastruktur dan pasar tradisional
  - 2) Masih rendahnya kualitas SDM, akses modal, kualitas produk dan akses pasar bagi UMKM
- b. Sasaran
  - 1) Rehabilitasi infrastruktur produksi dan pasar tradisional
  - 2) Pemantapan Pengembangan Kualitas dan kuantitas Kelembagaan UKM
  - 3) Pemantapan Modal Usaha untuk Masyarakat
  - 4) Penjaminan kredit
- c. Kebijakan
  - 1) Peningkatan akses UKM kepada sumber daya produktif
  - 2) Peningkatan kualitas SDM
  - 3) Pemberdayaan kapasitas industri
  - 4) Pengembangan iklim usaha yang kondusif
  - 5) Peningkatan fasilitasi UMKM terhadap sumberdaya modal
  - 6) Peningkatan daya saing produk
  - 7) Peningkatan kinerja dan citra koperasi
  - 8) Pembentukan lembaga penjaminan kredit

## **6. Kampanye Investasi dan Daya saing Ekspor**

- a. Permasalahan
  - 1) Masih rentannya keberlanjutan investasi dan rendahnya daya saing ekspor non-migas.
  - 2) Menurunnya kepercayaan pasar terhadap kapabilitas produksi.
  - 3) Menurunnya minat investasi karena posisi DIY kurang aman (daerah bencana).
  - 4) Ketidakjelasan fungsi lembaga yang menangani investasi
- b. Sasaran
  - 1) Mempertahankan tingkat investasi yang sudah ada dan meningkatkan investasi baru.
  - 2) Meningkatkan ekspor non-migas.
  - 3) Mengembalikan kepercayaan pasar terhadap kemampuan produksi dan keamanan investasi.

c. Kebijakan

- 1) Penciptaan iklim investasi dan berusaha melalui kampanye Jogja Aman.
- 2) Pemantapan dan perluasan negara tujuan dan produk ekspor.
- 3) Penyelenggaraan promosi dagang dan promosi investasi di dalam negeri dan luar negeri.
- 4) Pembinaan dan pengawasan standardisasi, akreditasi, dan pengendalian mutu produk.
- 5) Evaluasi fungsi kelembagaan yang menangani investasi

## **7. Penegakan Hukum dan Revitalisasi Kapasitas Kelembagaan**

a. Permasalahan

Penegakan hukum dan penguatan kapasitas kelembagaan belum optimal.

b. Sasaran

- 1) Meningkatnya upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
- 3) Penguatan kelembagaan yang menangani penegakan hukum.

c. Kebijakan

- 1) Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
- 2) Pembenahan manajemen kepegawaian: sistem renumerasi, data PNS, pembinaan karir berdasarkan prestasi, penerapan *reward and punishment*.
- 3) Reformasi birokrasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 4) Evaluasi kelembagaan yang menangani penegakan hukum.

## **8. Rekonstruksi dan Peningkatan Infrastruktur Publik**

a. Permasalahan

- 1) Banyaknya lingkungan permukiman yang rusak akibat gempa.
- 2) Kebutuhan air bersih untuk masyarakat belum dapat dilayani sepenuhnya.
- 3) Kondisi sanitasi perkotaan sebagian besar kurang memenuhi syarat.
- 4) Kondisi drainase sebagian besar kurang memenuhi syarat.



- 5) Ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan perumahan.
- 6) Prasarana jalan belum dapat melayani sepenuhnya kebutuhan pengguna jalan maupun mendukung pertumbuhan ekonomi dan wilayah.
- 7) Belum tersedianya sistem angkutan umum yang memadai
- 8) Adanya potensi rawan bencana yang mengancam DIY.

b. Sasaran

- 1) Meningkatkan kapasitas infrastruktur jalan, air bersih, perumahan, dan sistem transportasi sesuai dengan standar pelayanan minimum.
- 2) Mengembalikan kondisi infrastruktur yang rusak akibat gempa dengan prioritas pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pemerintahan.
- 3) Mengurangi resiko bencana alam

c. Kebijakan

- 1) Fasilitasi pembangunan kembali permukiman dan lingkungan permukiman yang rusak.
- 2) Peningkatan pelayanan infrastruktur jalan, air bersih, perumahan, dan sistem transportasi sesuai dengan standar pelayanan minimal.
- 3) Pembangunan kembali infrastruktur yang rusak dengan prioritas pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pemerintahan.
- 4) Mitigasi dan penanggulangan bencana alam.

## **9. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal**

a. Permasalahan

Masih adanya daerah tertinggal.

b. Sasaran

Meningkatnya pembangunan di daerah tertinggal

c. Kebijakan:

- 1) Pengembangan sarana dan prasarana ekonomi di daerah tertinggal.
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar di daerah tertinggal.